

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	iii
Abstrak.....	vii
Perdagangan Lintas Batas Antar-Negara: Memacu Pembangunan Ekonomi Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Belu <i>oleh: Humphrey Wangke</i>	1-24
ASEAN dan Ketahanan Pangan <i>oleh: Dinna Wisnu</i>	25-47
Kendala Pembangunan Provinsi Daerah Kepulauan: Studi Kasus Provinsi Kepulauan Riau <i>oleh: Ari Mulianta Ginting</i>	49-75
Kepentingan Strategis Amerika Serikat di Asia-Pasifik <i>oleh: Poltak Partogi Nainggolan</i>	77-103
<i>The Guiding Principles on Business and Human Rights:</i> Dialektika Korporasi dan Pemenuhan HAM <i>oleh: Yudha Akbar Pally</i>	105-128
Pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) di Indonesia melalui Kerjasama Internasional <i>oleh: Lisbet</i>	129-156
Pedoman Penulisan	

PENGANTAR REDAKSI

Memasuki Volume ke-empat, tahun 2013 ini, *Jurnal Politica* secara konsisten tetap menyajikan berbagai tulisan ilmiah di bidang politik dalam negeri dan hubungan internasional. Berbagai persoalan strategis akan dibahas oleh 6 (enam) penulis yang tulisannya akan dimuat dalam Volume 4, Nomor 1, Mei 2013 ini. Keenam persoalan strategis yang akan disajikan dalam edisi kali ini tetap memberikan penekanan kepada peran Dewan Perwakilan Rakyat sebagai salah satu cabang kekuasaan dalam sistem demokrasi yang dianut oleh Indonesia sekaligus memberikan berbagai rekomendasi terhadap beberapa persoalan yang mendera bangsa ini baik persoalan internal kebangsaan maupun persoalan internasional yang memiliki pengaruh terhadap Indonesia.

Tulisan pertama disajikan oleh saudara Humphrey Wangke yang berjudul “Perdagangan Lintas Batas Antar-Negara: Memacu Pembangunan Ekonomi Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Belu”. Tulisan ini didasarkan atas teori *Coordinated Border Management* yang menuntut perlunya koordinasi antar-lembaga pemerintah secara vertikal maupun horisontal, serta koordinasi dengan negara tetangga, agar perdagangan lintas batas antar-negara dapat berjalan efektif. Indonesia yang bercita-cita menjadikan perbatasan sebagai beranda depan masih sulit mewujudkannya karena masih sulitnya koordinasi dimaksud, walaupun potensi ekonomi yang dimiliki kabupaten di kawasan perbatasan telah cukup memadai untuk melakukan perdagangan lintas batas antar-negara seperti di Kabupaten Bengkayang di Provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan dengan negara Malaysia dan Kabupaten Belu di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berbatasan dengan negara Timor Leste. Pembentukan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) ternyata tidak serta merta dapat menyelesaikan masalah. Tulisan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRI) yang tengah membahas Rancangan Undang Undang (RUU) Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Selanjutnya, Saudari Dinna Wisnu yang menulis dengan judul “ASEAN dan Ketahanan Pangan”. Dinna Wisnu mengemukakan bahwa Ketahanan pangan adalah isu strategis bagi negara-negara ASEAN, namun pencapaiannya masih luput dari tahun ke tahun. Angka kemiskinan, ketidakmampuan mengakses

pangan dan gizi cukup memprihatinkan. Tulisan ini menyoroiti sudut pandang pembuatan kebijakan dan kerjasama antar pemerintah di bidang pangan yang tidak sesuai dengan perkembangan jaman. Model kebijakan dimana pemerintah mengarahkan perhatian pada produsen melalui subsidi, impor, kuota impor, atau pembangunan lumbung bersama sebenarnya memperpanjang ketidakcocokan pendekatan kebijakan untuk produsen dan konsumen, menghambat pengembangan agribisnis, meningkatkan risiko kenaikan harga pangan dan mendorong petani serta nelayan untuk meninggalkan pekerjaannya. Diusulkan suatu model kebijakan pangan dimana kebijakan pangan akan berpusat pada perlindungan lapangan kerja, penyediaan instrument kerjasama antarkomunitas dan pengembangan kapasitas agribisnis. Petani, nelayan dan agribisnis perlu diperlakukan sebagai subjek dan diberi kemampuan inovasi serta infrastruktur untuk berkompetisi dengan baik di sektor ini.

Pada tulisan ketiga, Ari Mulianta Ginting menulis dengan judul “Kendala Pembangunan Provinsi Daerah Kepulauan: Studi Kasus Provinsi Kepulauan Riau”. Tulisan Ari Mulianta Ginting ini merupakan kajian tentang provinsi kepulauan yang mengambil kasus Provinsi Kepulauan Riau. Pembahasan dilakukan dengan pendekatan studi literatur dan hasil kunjungan lapangan pada saat penyusunan Rancangan Undang-Undang Percepatan Pembangunan Provinsi Kepulauan. Penelitian ini bertujuan melihat lebih lanjut apa yang menjadi kendala yang dihadapi oleh provinsi berbasis kepulauan dengan mengambil sampel Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Dan hasil yang didapat bahwa terdapat banyak kendala yang dihadapi oleh provinsi yang berbasis kepulauan. Diantaranya adalah kondisi geografis yang dihadapi oleh Kepri menyulitkan dalam proses pembangunan, rendahnya dana alokasi umum yang diterima Kepri dan kendala terhadap pelayanan terhadap masyarakat terutama pelayanan dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Sehingga diperlukan campur tangan pemerintah pusat untuk dapat melakukan tindakan langsung mengatasi hal tersebut, salah satunya dengan bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat mengeluarkan regulasi khusus guna mempercepat proses pembangunan di daerah kepulauan.

Tulisan keempat disajikan oleh Saudara Poltak Partogi Nainggolan dengan judul “Kepentingan Strategis Amerika Serikat di Asia Pasifik”. Saudara Poltak Partogi menyatakan bahwa Sejak akhir 2011, perubahan kebijakan Amerika Serikat (AS) di kawasan Asia Pasifik tampak semakin jelas. Presiden Obama telah menyatakan secara tegas kehadiran kembali AS di kawasan ini setelah selama ini lebih menitikberatkan kebijakan AS di Timur-Tengah dan

Eropa. Tulisan ini bagian dari hasil penelitian mengenai perubahan orientasi kebijakan keamanan AS di kawasan. Penelitian bersifat deskriptis-analitis, dengan menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui kombinasi studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Temuan penelitian memperlihatkan relevansi kepentingan nasional AS dan perubahan orientasi kebijakan keamanannya di Asia Pasifik.

Tulisan kelima disampaikan oleh Saudara Yudha Akbar Pally dengan judul “*The Guiding Principles on Business and Human Rights: Dialektika Korporasi dan Pemenuhan HAM*”. Tulisan ini membahas bahwa Kerangka hukum internasional telah memberi ruang hadirnya *The Guiding Principles on Business and Human Rights* yang menempatkan korporasi sebagai pihak yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab di dalam penghormatan dan penegakkan HAM dewasa ini. Berkolaborasi dengan peran negara yang sebelumnya telah berdiri kokoh, korporasi mulai memetakan dan mengarahkan kebijakan mereka agar seusai dengan kerangka solusi *remedy* atau penanganan pelanggaran HAM yang ditawarkan oleh *Guiding Principles*. Kolaborasi ini harus sungguh-sungguh dijalani baik oleh korporasi maupun negara itu sendiri. Jika tidak, korporasi akan menuai kerugian materi dan non-materi yang tidak sedikit dan negara pun akan menghadapi sanksi internasional.

Tulisan terakhir edisi kali ini disajikan oleh Saudari Lisbet dengan judul “Pencapaian *Millenium Development Goals* (MDGs) di Indonesia melalui kerjasama Internasional”. Secara umum tulisan ini memberik analisis bahwa Indonesia telah berhasil mencapai beberapa tujuan yang terdapat di dalam MDGs. Kendati demikian, masih terdapat beberapa tujuan lainnya yang masih memerlukan kerja keras dari pemerintah Indonesia. Untuk mencapai tujuan-tujuan ini, Indonesia membutuhkan bantuan. Tulisan ini mengemukakan bahwa bantuan tersebut dapat dilakukan melalui meningkatkan kerjasama internasional tidak hanya dengan negara maju akan tetapi juga dengan negara berkembang sehingga Indonesia dapat mencapai tujuan-tujuan tersebut pada tahun 2015.

Berbagai tulisan yang tersaji di edisi kali ini, diharapkan dapat menjadi alternatif pemikiran atas berbagai persoalan yang relevan seperti tentang pengelolaan wilayah perbatasan, pengelolaan wilayah kepulauan dan persoalan keamanan serta internasional lainnya. Sajian berupa gagasan disertai analisis berdasarkan pisau teori yang sesuai, akan menghasilkan sebuah rekomendasi yang *compatible* dengan berbagai persoalan strategis yang ada. Sebagai sebuah kajian, redaksi berharap agar tulisan ini dapat menjadi referensi bagi yang

membutuhkan terutama para pengambil kebijakan. Redaksi mengucapkan terima kasih kepada DR. Lili Romli, M.Si, Peneliti Utama pada Pusat Penelitian Politik LIPI dan DR. Ganewati Wuryandari, MA, Peneliti pada Pusat Penelitian Politik LIPI sebagai Mitra Bestari, atas koreksi dan masukannya terhadap semua tulisan dalam *Jurnal Politica* edisi kali ini.

Jakarta, Mei 2013

Redaksi

Kata Kunci bersumber dari artikel
Lembar ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

Humphrey Wangke

Perdagangan Lintas Batas Antar-Negara: Memacu Pembangunan
Ekonomi Kabupaten Bengkayang Dan Kabupaten Belu

Analisis dalam tulisan ini didasarkan atas teori *Coordinated Border Management* yang menuntut perlunya koordinasi antar-lembaga pemerintah secara vertikal maupun horisontal, serta koordinasi dengan negara tetangga, agar perdagangan lintas batas antar-negara dapat berjalan efektif. Indonesia yang bercita-cita menjadikan perbatasan sebagai beranda depan masih sulit mewujudkannya karena masih sulitnya koordinasi dimaksud, walaupun potensi ekonomi yang dimiliki kabupaten di kawasan perbatasan telah cukup memadai untuk melakukan perdagangan lintas batas antar-negara seperti di Kabupaten Bengkayang di Provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan dengan negara Malaysia dan Kabupaten Belu di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berbatasan dengan negara Timor Leste. Pembentukan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) ternyata tidak serta merta dapat menyelesaikan masalah. Tulisan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang tengah membahas Rancangan Undang Undang (RUU) Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Kata Kunci: Perdagangan lintas batas, BNPP, *coordinated border management*, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Belu

Humphrey Wangke

*Cross-Border Trade: Accelerating Economic Development
of Bengkayang and Belu Regencies*

The analysis in this essay refers to coordinated border management theory which emphasizes coordination inter- institutions, both vertically and horizontally, as well as inter-states, therefore, cross-border trade can be managed effectively. Indonesia which wants to create its border areas as its front yard is founded difficult to realize its dream due to the poor coordination among state institutions. This is contradictory with the potential conditions of its border areas such as in Bengkayang in West Kalimantan and Belu in East Nusa Tenggara, which respectively located close to Malaysia and Timor Leste. In fact, the formation of National Board for Border Management (BNPP) cannot automatically help overcome problems encountered in the many places of the country's border. The essays is intended to give recommendations to DPR which is now discussing Bill on the Acceleration of Development in Underdeveloped Regions.

Keywords: cross-border trade, coordinated border management, Bengkayang, Belu, BNPP

Kata Kunci bersumber dari artikel
Lembar ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

Dinna Wisnu

ASEAN dan Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan adalah isu strategis bagi negara-negara ASEAN, namun pencapaiannya masih luput dari tahun ke tahun. Angka kemiskinan, ketidakmampuan mengakses pangan dan gizi cukup memprihatinkan. Tulisan ini menyoroti sudut pandang pembuatan kebijakan dan kerjasama antar pemerintah di bidang pangan yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Model kebijakan dimana pemerintah mengarahkan perhatian pada produsen melalui subsidi, impor, kuota impor, atau pembangunan lumbung bersama sebenarnya memperpanjang ketidakcocokan pendekatan kebijakan untuk produsen dan konsumen, menghambat pengembangan agribisnis, meningkatkan risiko kenaikan harga pangan dan mendorong petani serta nelayan untuk meninggalkan pekerjaannya. Diusulkan suatu model kebijakan pangan dimana kebijakan pangan akan berpusat pada perlindungan lapangan kerja, penyediaan instrumen kerjasama antar komunitas dan pengembangan kapasitas agribisnis. Petani, nelayan dan agribisnis perlu diperlakukan sebagai subyek dan diberi kemampuan inovasi serta infrastruktur untuk berkompetisi dengan baik di sektor ini.

Kata kunci: Ketahanan pangan, agribisnis, ASEAN, model kebijakan pangan, petani, nelayan

Dinna Wisnu

ASEAN Food Security

Food Security is strategic for ASEAN countries, but the achievement is far from expectation from year to year. Poverty, access to food and nutrition is concerning. This paper focuses on the perspective of policymaking and inter-governmental cooperation on food security, which is argued as obsolete. A policy-making model where governments direct their attention to producers through subsidies, import, import quota, and joint-effort to collect grains for difficult times is actually prolonging mismatch of policy approach for producers and consumers, obstructing agribusiness development, increasing the risk for food price inflation also enforcing farmers and fishermen to leave their jobs. A model of food policy is recommended where food policy would be based on employment protection, provision of instrument for cooperation between communities and capacity development program for agribusiness. Farmers, fishermen and agribusiness are subjects and need to be equipped with innovation and infrastructure to compete well in this sector.

Keywords: Food security, agribusiness, food policy model, peasant, farmer

Kata Kunci bersumber dari artikel
Lembar ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

Ari Mulianta Ginting

Kendala Pembangunan Provinsi Daerah Kepulauan:
Studi Kasus Provinsi Kepulauan Riau

Studi ini membahas kondisi dewas ini di Provinsi Kepulauan Riau yang memerlukan pendekatan yang khusus. Pembahasan dilakukan dengan pendekatan studi literature dan hasil kunjungan lapangan pada saat penyusunan Rancangan Undang-Undang Percepatan Pembangunan Provinsi Kepulauan. Penelitian ini bertujuan melihat lebih lanjut apa yang menjadi kendala yang dihadapi oleh Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Temuan memperlihatkan terdapat banyak kendala yang dihadapi oleh provinsi yang berbasis kepulauan. Di antaranya, kondisi geografis yang dihadapi oleh Kepri menyulitkan pembangunan, rendahnya dana alokasi umum yang diterima, dan kendala pelayanan dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Sehingga diperlukan campur tangan pemerintah pusat untuk mengatasi hal tersebut, salah satunya dengan bersama-sama Dewan Perwakilan rakyat mengeluarkan kebijakan khusus guna mempercepat proses pembangunan di daerah kepulauan.

Kata Kunci: Provinsi kepulauan, keuangan daerah, pelayanan publik

Ari Mulianta Ginting

*Development Problems in Archipelagic Provinces:
A Case Studies of the Riau Archipelagic Province*

This Study discusses current situation in the Riau Archipelagic Province, which needs a special development approach. Its analysis is made based on library studies and reports of discussions of Bill on Development Acceleration of the Archipelagic Provinces. This research looks further into the constraints facing in Riau. Its finding reveals some problems, for instance, geographical conditions, low general allocation fund, and poor education and health services. Therefore, central government's intervention is needed, together with DPR, to issue special policy to accelerate development in the archipelagic province.

Keywords: Archipelagic province, regional finance, public service

Kata Kunci bersumber dari artikel
Lembar ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

Poltak Partogi Nainggolan

Kepentingan Strategis Amerika Serikat Di Asia-Pasifik

Sejak akhir 2011, perubahan kebijakan Amerika Serikat (AS) di kawasan Asia Pasifik tampak semakin jelas. Presiden Obama telah menyatakan secara tegas kehadiran kembali AS di kawasan ini setelah selama ini lebih menitikberatkan kebijakan AS di Timur-Tengah dan Eropa. Tulisan ini bagian dari hasil penelitian mengenai perubahan orientasi kebijakan keamanan AS di kawasan. Penelitian bersifat deskriptis-analitis, dengan menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui kombinasi studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Temuan penelitian memperlihatkan relevansi kepentingan nasional AS dan perubahan orientasi kebijakan keamanannya di Asia Pasifik.

Kata Kunci: AS, Indonesia, RRC, kebijakan keamanan, paradigma keamanan, kepentingan strategis, Asia-Pasifik

Poltak Partogi Nainggolan

United States' Strategic Interests in Pacific-Asia

Since the end of 2011, US changing policy on Asia-Pacific can be more obviously seen. President Obama, for example, has stated that US will permanently exist in the region after for long time focused its policy on Middle East and Europe. This article is part of a research report on the changing paradigm of US security policy in the Asia-Pacific region. The article is developed from a descriptive analytical research which applies a qualitative method. Data gathering is conducted by combining library studies and open in-depth interviews. Findings reveal the relevance between US national interest and the changing orientation of US security policy in Asia-Pacific.

Keywords: US, Indonesia, PRC, security interest, strategic interest, Asia-Pacific

Kata Kunci bersumber dari artikel
Lembar ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

Yudha Akbar Pally

The Guiding Principles On Business And Human Rights:

Dialektika Korporasi Dan Pemenuhan Ham

Kerangka hukum internasional telah memberi ruang hadirnya *The Guiding Principles on Business and Human Rights* yang menempatkan korporasi sebagai pihak yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab di dalam penghormatan dan penegakkan HAM dewasa ini. Berkolaborasi dengan peran negara yang sebelumnya telah berdiri kokoh, korporasi mulai memetakan dan mengarahkan kebijakan mereka agar seusai dengan kerangka solusi *remedy* atau penanganan pelanggaran HAM yang ditawarkan oleh *Guiding Principles*. Kolaborasi ini harus sungguh-sungguh dijalani baik oleh korporasi maupun negara itu sendiri. Jika tidak, korporasi akan menuai kerugian materi dan non-materi yang tidak sedikit dan negara pun akan menghadapi sanksi internasional.

Kata kunci: Korporasi, *guiding principles*, hukum HAM internasional, *due diligence*

Yudha Akbar Pally

The Guiding Principles on Business and Human Rights: Controversies between Corporations' Interests and Fulfilling Human Rights Aspirations

The international law has provided opportunity for the formulation of The Guiding Principles on Business and Human Rights that underlines corporation as the party securing an obligation and responsibility in respect for and enforcement of human rights today. In collaboration with long-firmly standing roles of the state, corporation has begun to map and direct their policies parallel in the framework of remedy of human rights violations offered by the Guiding Principles. This collaboration should be seriously undertaken by both corporation and the state. If not, the corporation will be punished through material and non-material loss and the state would face international sanctions.

Keywords: Corporation, *guiding principles*, international human rights law, *due diligence*

Kata Kunci bersumber dari artikel
Lembar ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

Lisbet

Pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) di Indonesia melalui Kerjasama Internasional

Indonesia telah berhasil mencapai beberapa tujuan yang terdapat di dalam MDGs. Kendati demikian, masih terdapat beberapa tujuan lainnya yang masih memerlukan kerja keras dari pemerintah Indonesia. Untuk mencapai tujuan-tujuan ini, Indonesia membutuhkan bantuan. Tulisan ini mengemukakan bahwa bantuan tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan kerjasama internasional tidak hanya dengan Negara maju akan tetapi juga dengan Negara berkembang sehingga Indonesia dapat mencapai tujuan-tujuan tersebut pada tahun 2015.

Kata Kunci: Indonesia, tujuan pembangunan millennium, kerjasama internasional

Lisbet

Fulfilling Millennium Development Goals (MDGs) in Indonesia through International Cooperations

Indonesia has succeeded to achieve several target in the Millennium Development Goals (MDGs). There are other targets that need more effort to be achieved by the government. Because of this reason, the writer argues the country needs assistance. This paper says that the assistance can be done by increasing international cooperation not only with developed but also with developing countries.

Keywords: Indonesia, millennium development goals (MDGs), international cooperations